

ANALISIS PERSEPSI PENGUSAHA TERHADAP IKLIM USAHA DI KOTA MEDAN

Ernita Lestari
Paidi Hidayat

***Abstrak** : This study aims to determine how perceptions of entrepreneurs about the business climate in the city of Medan and what is the most dominant factor as a determinant of the business climate in the city of Medan. This research uses primary data and secondary data collection methods of data observation, literature review, and a questionnaire addressed to 100 employers as respondents were randomly selected (random sampling). The analysis technique used in this study is a descriptive analysis, which is supported by qualitative data quantitative data processing. The results of the analysis indicate that the perception of the entrepreneur, the business climate in the city of Medan conducive. It is seen from the influence of government policy, political and social stability, bureaucracy and infrastructure. And from the research result shows that the political and social stability is considered the most dominant factor as a determinant of business climate, followed by bureaucracy and infrastructure and government policy.*

***Keywords** : Business Climate, Government Policy, Politics and Social Stability, Infrastructure, Bureaucracy.*

PENDAHULUAN

Perkembangan Kota Medan dari tahun ke tahun sangat pesat. Kehadiran gedung-gedung pencakar langit, pusat-pusat perbelanjaan dan perkantoran modern, perhotelan, sarana transportasi umum modern serta kelengkapan sarana umum lain dalam konteks modern, menjadikan Medan sebagai Kota Metropolitan. Tentu saja Medan banyak dilirik oleh para calon investor sebagai daerah terbaik untuk berinvestasi di luar Pulau Jawa. Kondisi tersebut di atas dapat membentuk persepsi tentang iklim investasi di Kota Medan.

Untuk membentuk persepsi tersebut, tidak terlepas dari peran pemerintah dengan kebijakan yang menarik minat pengusaha agar mau berinvestasi. Pengusaha dapat menjalankan bisnisnya sekaligus membantu pemerintah mengembangkan atau bahkan memajukan sebuah kawasan. Dengan investasi kreatif dan inovatif menjadikan Kota Medan memiliki berbagai bidang usaha yang dapat dinikmati masyarakat.

Dalam perannya sebagai salah satu komponen masyarakat, pengusaha harus memiliki rasa tanggungjawab atas terwujudnya tujuan pembangunan nasional, yaitu kesejahteraan sosial, spiritual dan material. Untuk mewujudkan hal itu, pengusaha harus mampu menyusun dan mengaplikasikan managerial perusahaannya serta melihat peluang bisnis yang menguntungkan. Namun harus tetap sejalan dengan program pemerintah. Maka dari itu pengusaha juga harus memenuhi kualifikasi yang ditetapkan pemerintah sebagai syarat utama berinvestasi. Setelah itu, pengusaha juga harus memenuhi aturan yang ditetapkan pemerintah.

Setiap pengusaha atau investor akan mempertimbangkan adanya stabilitas politik, kepastian hukum, kepastian berusaha, dan tersedianya infrastruktur yang memadai. Selain itu, faktor ekonomi, politik dan kelembagaan, sosial dan budaya diyakini merupakan beberapa faktor pembentuk iklim investasi di suatu daerah. Untuk itu, para investor perlu diyakinkan bahwa daerah tersebut mempunyai iklim investasi yang sehat dan kemudahan serta kejelasan prosedur penanaman modal.

Banyaknya kebijakan pemerintah yang tidak jelas, menimbulkan pungutan-pungutan baru baik yang legal maupun ilegal. Masalah lain muncul berkenaan dengan iklim investasi. Berdasarkan data hasil survei BaPenas dan Lembaga Penelitian Ekonomi Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) tahun 2008; *Pertama*, belum optimalnya pelaksanaan harmonisasi pusat dan daerah. *Kedua*, kualitas infrastruktur yang kurang memadai. *Ketiga*, masih cukup panjangnya perizinan investasi sehingga masih tingginya biaya perizinan investasi dibandingkan dengan negara kompetitor. *Keempat*, belum tercukupinya pasokan energi yang dibutuhkan untuk kegiatan industri. Krisis listrik yang sempat terjadi di Kota Medan, membuat pengusaha harus mengeluarkan biaya tambahan produksi. *Kelima*, banyak peraturan daerah yang menghambat iklim investasi. *Keenam*, masih terkonsentrasinya sebaran investasi di Pulau Jawa dan belum optimalnya pelaksanaan teknologi.

Selain itu masalah birokrasi, pungutan liar dan ketidakpastian hukum juga mengurangi investasi di daerah. Tumpang tindihnya kebijakan antar pusat dan daerah serta antar sektor membuat belum mantapnya pelaksanaan program desentralisasi. Akibatnya, terjadi kesimpang siuran wewenang antara pemerintah pusat dan daerah dalam kebijakan investasi. Dalam penelitian SMERU berkesimpulan bahwa salah satu tujuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah memperbaiki pelayanan pemerintah kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Di dalamnya terdapat kebijakan dan pelayanan agar dunia usaha dapat berkembang ke arah yang lebih kondusif. Dengan terciptanya kondisi yang kondusif, maka dapat diharapkan adanya peningkatan aktivitas perekonomian yang pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pemerintah Daerah telah menerapkan peraturan daerah yang dimaksudkan untuk meningkatkan PAD namun tanpa mempertimbangkan beban yang harus ditanggung oleh para pengusaha. Namun demikian, telah dilakukan upaya-upaya yang signifikan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, antara lain: (1). Reformasi pelayanan investasi, (2). Sistem informasi potensi investasi, dan (3). Peningkatan dan provisi infrastruktur fisik.

Segala kondisi dan persyaratan investasi tersebut di atas juga berlaku di Medan. Sebagai kota terbesar ke tiga di Indonesia, Medan juga menjadi pusat ekonomi di Pulau Sumatera. Maka tidak heran jika ibu kota Provinsi Sumatera Utara ini berkembang sangat pesat. Tak hanya itu, letak Kota Medan yang sangat strategis, terletak di semenanjung Sumatera dengan pelabuhan Belawan yang termashur, menjadikan kota ini sebagai destinasi industri yang cukup menjanjikan. Namun karena beberapa sistem birokrasi yang ada, sehingga mempengaruhi persepsi pengusaha dalam menanamkan modalnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Iklim Usaha

Iklim usaha tidak terlepas dari kebijakan pemerintah, situasi politik serta beberapa hal lain secara langsung atau tidak. Banyak pakar mengatakan, perbaikan iklim usaha mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Namun tidak semua hal itu dijalankan dengan baik oleh pihak-pihak terkait. Bahkan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lewat akun twitternya yang dikutip Kantor Berita Antara juga mengakui hal itu. Bahkan SBY meminta kepada semua pihak agar menjaga iklim investasi nasional dengan cara mencegah dan menghilangkan hambatan investasi di pusat dan di daerah. SBY juga memerintahkan kepada Gubernur, Walikota, Bupati agar bekerja penuh dan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya.

Tambunan (2006), mengemukakan iklim usaha yang kondusif adalah iklim usaha yang mendorong seseorang melakukan investasi dengan biaya dan resiko serendah mungkin, dan menghasilkan keuntungan jangka panjang yang tinggi. Suatu kondisi iklim usaha yang ideal akan memberikan kesempatan bagi perusahaan dari usaha-usaha mikro ke multinasional

atau perusahaan swasta untuk berkembang dan melakukan investasi secara produktif, menciptakan pekerjaan dan berkembang.

Iklim usaha adalah suatu kumpulan faktor-faktor lokasi tertentu yang membentuk kesempatan dan dorongan bagi perusahaan untuk melakukan investasi secara produktif, menciptakan pekerjaan, dan mengembangkan diri. Kebijakan dan perilaku pemerintah memiliki suatu pengaruh yang besar melalui dampaknya terhadap biaya, risiko, dan pembatasan bagi persaingan (World Bank, 2005: 32). Iklim usaha yang kondusif akan mendorong produktivitas yang lebih tinggi dengan memberikan kesempatan-kesempatan dan insentif bagi badan-badan usaha untuk berkembang, menyesuaikan diri dan menerapkan cara-cara yang lebih baik dalam menjalankan investasi.

Investasi yang ditanam di suatu daerah ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Tingkat keuntungan yang diramalkan
2. Suku Bunga
3. Ramalan mengenai ekonomi di masa depan
4. Kemajuan teknologi
5. Tingkat pendapatan nasional dan perubahannya
6. Keuntungan yang diperoleh
7. Situasi politik
8. Pengeluaran yang dilakukan pemerintah
9. Kemudahan yang diberikan oleh pemerintah setempat

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah yang bersifat kondusif akan berdampak positif pada iklim investasi. Kebijakan moneter longgar (*easy monetary policy*) yang merupakan kebijakan dari pemerintah akan ditandai dengan tingkat bunga yang rendah dan penyaluran kredit yang tinggi, dan kebijaksanaan fiskal yang kondusif seperti adanya *tax holiday*. Tingkat pajak (keuntungan usaha, bea masuk, pertambahan nilai) yang rendah, dan biaya energi (listrik dan BBM) yang murah, kemudahan perizinan dan birokrasi cenderung berdampak positif bagi kegiatan investasi. Sebaliknya yang terjadi terhadap investasi adalah negatif jika kebijaksanaan pemerintah bersifat ketat baik di sektor moneter, fiskal dan sektor lainnya.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2007, paket kebijakan investasi juga menjadi salah satu substansi penting. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Perpres 19 tahun 2006, langkah-langkah yang akan direncanakan pemerintah dalam kaitannya dengan kebijakan investasi terutama untuk perbaikan iklim investasi adalah:

1. Penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan penanaman modal, yang diharapkan dapat diundangkan pada tahun 2006.
2. Penyederhanaan prosedur dan peningkatan pelayanan penanaman modal baik di tingkat pusat maupun daerah.
3. Penanganan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (penegakan hukum dan kerja sama dengan instansi terkait).
4. Penyusunan rancangan amandemen UU No. 5 Tahun 1999.

Memprakarsai dan mengkoordinasikan pembangunan kawasan industri.

Kestabilan Politik dan Sosial

Kestabilan politik dan sosial merupakan unsur penting lain dalam melaksanakan iklim usaha yang kondusif. Kondisi politik yang kurang stabil dan tidak menentu dapat berpengaruh pada menurunnya gairah investasi begitu juga sebaliknya. Ketidakstabilan politik mengakibatkan arah kebijakan pemerintah tidak jelas dan tidak ada kepastian hukum, misalnya karena seringnya pergantian menteri. Di sisi lain hal ini dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi makro seperti tingkat inflasi dan ketidakstabilan rupiah. Kota Medan merupakan daerah yang didominasi oleh macam-macam suku bangsa dan ras maka berpotensi

terjadi kerusuhan yang bersifat etnis, agama, separatisme, kecemburuan social. Maka pengusaha cenderung teliti mendirikan atau menanamkan modalnya di daerah tersebut.

Ada sejumlah faktor yang sangat berpengaruh pada baik-tidaknya iklim investasi. Faktor-faktor tersebut tidak hanya menyangkut stabilitas politik dan sosial, tetapi juga stabilitas ekonomi, kondisi infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi dan prasarana jalan dan pelabuhan), berfungsinya sektor pembiayaan dan pasar tenaga kerja (termasuk isu-isu perburuhan dan demonstrasi), regulasi dan perpajakan, birokrasi (dalam waktu dan biaya yang diciptakan), masalah *good governance* termasuk korupsi, konsistensi dan kepastian dalam kebijakan pemerintah yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keuntungan neto atas biaya resiko jangka panjang dari kegiatan investasi, dan hak milik mulai dari tanah sampai kontrak. Dalam hal ini permasalahan tersebut dilihat dalam konteksnya dengan daerah.

Keputusan-keputusan pengusaha sangat dipengaruhi oleh perkembangan dalam lingkungan politik/hukum. Lingkungan ini terbentuk oleh hukum-hukum, lembaga, pemerintah, dan kelompok penentang yang mempengaruhi dan membatasi gerak-gerik berbagai kegiatan si pengusaha.

Birokrasi

Birokrasi merupakan instrumen pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang efisien, efektif, berkeadilan, transparan dan akuntabel. Hal ini berarti bahwa untuk mampu melaksanakan fungsi pemerintah dengan baik maka organisasi birokrasi harus profesional, tanggap, aspiratif terhadap berbagai tuntutan masyarakat yang dilayani. Seiring dengan hal tersebut pembinaan aparatur negara dilakukan secara terus-menerus, agar dapat menjadi alat yang efisien dan efektif, bersih dan berwibawa, sehingga mampu menggerakkan pembangunan secara lancar dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian terhadap masyarakat.

Tjokroamidjojo (1988) mengidentifikasi ada empat aktor besar yang menghambat efisiensi administrasi negara (birokrasi), yaitu:

- a. Luasnya campur tangan terhadap kehidupan masyarakat.
- b. Lemahnya kemampuan manajemen pembangunan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, dan pengawasan.
- c. Rendahnya produktivitas pegawai negeri. Siagian (1987), mengidentifikasi ada tiga jenis kelemahan yang melekat pada pegawai negeri, yaitu:
 1. Kemampuan manajerial, yaitu kurangnya kemampuan memimpin, menggerakkan bawahan, melakukan koordinasi dan mengambil keputusan.
 2. Kecenderungan membengkaknya birokrasi baik dalam arti struktural maupun Kemampuan teknis, yaitu kurangnya kemampuan untuk secara terampil melakukan tugas-tugas, baik yang bersifat rutin, maupun yang bersifat pembangunan.
 3. Kemampuan teknologis, yaitu kurangnya kemampuan untuk memanfaatkan hasil-hasil penemuan teknologi dalam pelaksanaan tugas.

Peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Investasi

Peran Ekonomi Daerah adalah suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan rill perkapita penduduk suatu daerah dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Pemerintah daerah memiliki empat peran strategi dalam pembangunan ekonomi daerah, yakni:

1. Peran sebagai enterpreneur, pemda bertanggung jawab menjalankan bisnis (BUMD)
2. Peran koordinator, penetapan dalam kebijakan dan strategi pembangunan yang melibatkan masyarakat

3. Peran fasilitator, pemerintah daerah mempercepat pembangunan daerah melalui perbaikan lingkungan (perilaku)
4. Peran stimulator, memberikan rangsangan pengembangan usaha dan investasi.

Berdasarkan fungsi dan peranan di atas dalam pembangunan ekonomi daerah maka pemerintah daerah memiliki beberapa strategi dalam pengembangan ekonominya. Beberapa strategi dapat dilakukan melalui:

1. Pengembangan fisik atau lokalitas, kawasan industri, kawasan investasi lainnya.
2. Strategi pengembangan dunia usaha melalui upaya-upaya kebijakan yang merangsang usaha, melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Perbaikan kualitas lingkungan
 - b. Pengembangan pusat informasi dan promosi
 - c. Pusat pengembangan usaha kecil
 - d. Pusat penelitian produk daerah.

Infrastruktur

Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg, 2000).

Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan.

Dampak dari kekurangan infrastruktur serta kualitasnya yang rendah menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja. Sehingga pada akhirnya banyak perusahaan akan keluar dari bisnis atau membatalkan ekspansinya. Karena itulah infrastruktur sangat berperan dalam proses produksi dan merupakan prakondisi yang sangat diperlukan untuk menarik akumulasi modal sektor swasta.

Dalam World Bank Report, infrastruktur dibagi dalam 3 golongan, yaitu (Bank Dunia, 1994 dalam Bagus Teguh Pamungkas, 2009):

- a. Infrastruktur ekonomi, merupakan aset fisik yang menyediakan jasa dan digunakan dalam produksi dan konsumsi final meliputi *public utilities* (telekomunikasi, air minum, sanitasi dan gas), *public works* (bendungan, saluran irigasi dan drainase) serta sektor transportasi (jalan, kereta api, angkutan pelabuhan dan lapangan terbang).
- b. Infrastruktur sosial, merupakan aset yang mendukung kesehatan dan keahlian masyarakat meliputi pendidikan (sekolah dan perpustakaan), kesehatan (rumah sakit, pusat kesehatan) serta untuk rekreasi (taman, museum dan lain-lain).
- c. Infrastruktur administrasi/institusi, meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi dan koordinasi serta kebudayaan.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini berdasarkan data sekunder, yang berasal dari studi kepustakaan (*library research*) baik dari dinas atau badan dan instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pusat Statistik Kota Medan serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Metode Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis deskriptif, dimana data kualitatif didukung oleh pengelolaan data kuantitatif. Metode yang digunakan dengan pengukuran menggunakan skala Likert. Pada tahun 1932 Rensis Likert mengembangkan teknik ini untuk mengukur sikap masyarakat.

Untuk melihat persepsi pengusaha tentang iklim usaha di Kota Medan dan untuk melihat faktor yang dominan sebagai penentu iklim usaha di Kota Medan menggunakan tabulasi hasil jawaban kuesioner.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Iklim Usaha di Kota Medan

Kota Medan sebagai ibu kota propinsi Sumatera Utara dahulu adalah penghasil tembakau dengan kualitas terbaik di dunia. Hal itu pula yang menjadikan nama Medan sebagai lokasi berinvestasi untuk membuka usaha atau perkebunan. Sekarang Kota Medan memiliki luas 26.510 Ha atau setara dengan 265,10 km². Luas wilayah Kota Medan merupakan 3,6% dari total luas wilayah Sumatera Utara secara keseluruhan dengan jumlah penduduk 2,2 juta jiwa.

Jika dilihat dari perkembangan dan pembangunan di kota ini, seharusnya banyak masyarakatnya yang menekuni dunia usaha. Tapi pada kenyataannya, hanya 1% - 2% saja. Selebihnya banyak yang ingin berkarir di institusi pemerintahan, menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau anggota TNI/Polri sebagai sebuah pencapaian yang sangat prestisius. Berbanding terbalik dengan kondisi dan minat masyarakat terhadap dunia usaha. Dengan kondisi tersebut, maka peluang untuk membuka usaha di Kota Medan semakin terbuka lebar.

Meski begitu, Kota Medan tetap menempati urutan pertama dalam dunia industri dan usaha di Sumatera Utara. Seperti yang terlihat pada (Tabel 1.1) . Dari tabel tersebut terlihat pertumbuhan dan perkembangan usaha secara keseluruhan di Sumatera Utara selama satu dekade mencapai 37,6% atau 38%. Sedangkan di Kota Medan mengalami peningkatan hampir 40% dari tahun 1996 yakni 133.828 usaha, sedangkan di tahun 2006 terdapat 222.133 usaha. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah dunia usaha setiap tahun sekitar 4%. Dari persentasi tersebut dapat dikatakan terjadi perkembangan ke arah yang positif setiap tahunnya sekaligus bukti iklim usaha di Kota Medan kondusif.

Peningkatan jumlah usaha itu juga membuktikan animo dan ketertarikan pelaku usaha untuk berinvestasi di Kota Medan. Hal itu terlihat dari perkembangan dunia usaha yang semakin beraneka ragam. Perkembangan pola pikir dan perilaku masyarakat juga mengalami kemajuan. Misalnya, masyarakat lebih tertarik untuk menginvestasikan uang mereka dengan mendirikan usaha seperti restoran dan usaha kuliner lainnya. Selain itu, pengaruh pasar bebas juga mempengaruhi pola bisnis para pengusaha yang melirik bisnis di bidang elektronik, sedangkan pembangunan yang terus dilakukan pemerintah, membuat para pengusaha mencoba untuk menjadi pihak ke tiga yang menawarkan jasa. Sehingga perusahaan yang bergerak di bidang jasa sangat banyak ditemui di Kota Medan.

Tabel 1.1
Banyaknya Usaha di Beberapa Kabupaten/Kota Tahun 2012

No.	Kabupaten/Kota	Usaha	
		1996	2006
A.	Kabupaten		
1.	Nias	42.628	28.407
2.	Mandailing Natal	-	26.830
3.	Tapanuli Selatan	65.561	40.317
4.	Tapanuli Tengah	15.570	24.797
5.	Tapanuli Utara	43.814	21.011
6.	Toba Samosir	-	12.820
7.	Labuhanbatu	35.004	75.353
8.	Asahan	51.423	84.401
9.	Simalungun	33.043	57.697
10.	Dairi	10.168	17.406
11.	Karo	13.877	23.600
12.	Deli Serdang	103.429	135.914
13.	Langkat	49.626	88.455
14.	Nias Selatan	-	16.423
15.	Humbang Hasundutan	-	11.575
16.	Pakpak Barat	-	1.506
17.	Samosir	-	7.936
18.	Serdang Bedagai	-	50.411
B.	Kota		
1.	Sibolga	7.999	10.642
2.	Tanjungbalai	9.584	16.629
3.	Pematangsiantar	15.840	26.997
4.	Tebing Tinggi	10.223	14.106
5.	Medan	133.828	222.133
6.	Binjai	17.291	23.443
7.	Padangsidempuan	-	17.744
	Jumlah/Total	658.908	1.056.553

Sumber BPS Kota Medan 2012

Profil Responden

Berdasarkan hasil tabulasi terhadap 100 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini didapat informasi bahwa mayoritas responden berjenis kelamin pria sebesar 79% dan selebihnya berjenis kelamin wanita sebesar 21%. Sedangkan responden yang paling banyak diwawancarai berusia 31-40 tahun berkisar 39%, diikuti usia 41-50 tahun yang berjumlah 33% dan usia 20-30 tahun berjumlah 16% serta yang berusia di atas 50 tahun hanya berjumlah 12% responden (Tabel 2). Sementara itu untuk tingkat pendidikan responden pada umumnya tamatan D3/S1/S2 mencapai 61% dan selebihnya tamatan SMA/ sederajat sebesar 38% dan hanya sekitar 1% dari responden yang tamatan SMP/ sederajat.

Tabel 1.2
Karakteristik Responden

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persen (%)
1.	Pria	79	79
2	Wanita	21	21
No.	Umur (tahun)	Jumlah	Persen (%)
1.	20-30	16	16
2.	31-40	39	39
3.	41-50	33	33
4.	>50	12	12%
No.	Pendidikan	Jumlah	Persen (%)
1.	SMP/ sederajat	1	1
2.	SMA/ sederajat	38	38
3.	D3/S1/S2	61	61

Sumber : Data Skunder diolah

Persepsi Pengusaha Tentang Iklim Usaha di Kota Medan

Dari (Tabel 3) dapat diketahui responden sangat setuju jika iklim usaha di Kota Medan kondusif. Terlihat dari 59 responden (59%) yang mengatakan sangat setuju. Sedangkan 39 lainnya (39%) mengatakan setuju. Hanya 2 responden (2%) yang kurang setuju. Para responden beranggapan bahwa Medan sebagai kota metropolitan yang terus dilirik oleh pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di Kota Medan.

Tabel 1.3
Persepsi Pengusaha Tentang Kondisi Iklim Usaha di Kota Medan Kondusif

No.	Jawaban	Jumlah	Persen (%)
1.	Sangat setuju	59	59
2.	Setuju	39	39
3.	Kurang setuju	2	2
4.	Tidak setuju	0	0
5.	Sangat tidak setuju	0	0
Total		100	100

Sumber : Data Primer diolah

Dari (Tabel 4) para rata-rata responden mengatakan kebijakan yang dibuat Pemerintah Kota Medan dalam dunia usaha dinilai baik. Ada 51 responden (51%) yang sangat setuju dan 47 responden (47%) yang setuju. Namun 2 responden (2%) yang tidak setuju.

Para pengusaha menilai kebijakan pemerintah Kota Medan dalam dunia usaha dinilai baik. Banyak kebijakan pemerintah yang dianggap pro terhadap pengusaha, contohnya kebijakan Sistem Perizinan Satu Atap (Sintap), adanya kebijakan yang mengalokasikan kawasan industri seperti KIM dan PIK yang mempermudah pengusaha dalam mengembangkan usahanya.

Tabel 1.4
Persepsi Pengusaha Tentang Kebijakan Pemerintah Kota Medan
dalam Dunia Usaha dinilai Baik

No.	Jawaban	Jumlah	Persen (%)
1.	Sangat setuju	51	51
2.	Setuju	47	47
3.	Kurang setuju	1	1
4.	Tidak setuju	1	1
5.	Sangat tidak setuju	0	0
Total		100	100

Sumber : Data Primer diolah

Dari (Tabel 5) dapat dilihat bahwa para responden sepakat bahwa Kota Medan dinilai aman untuk membuka usaha. Karena hampir seluruh responden menganggap tidak ada bencana alam yang mengancam dunia usaha, tidak ada kerusakan yang membahayakan dunia usaha dan tidak ada gonjang-ganjing politik yang mengganggu jalannya sistem produksi dalam dunia usaha. Hal itu dapat dilihat dari jawaban responden yang mengatakan sangat setuju sebanyak 59 pengusaha (59%) dan 39 responden (39%) yang menyatakan setuju. Hanya 2 responden (2%) yang tidak setuju.

Hal tersebut membuktikan bahwa hampir semua pengusaha menilai Kota Medan sangat kondusif dan aman untuk dunia usaha. Tidak ada aksi premanisme dan aksi demonstrasi yang mengganggu dunia usaha.

Tabel 1.5
Persepsi Pengusaha Tentang Kota Medan dinilai Aman untuk Membuka Usaha

No.	Jawaban	Jumlah	Persen (%)
1.	Sangat setuju	59	59
2.	Setuju	39	39
3.	Kurang setuju	2	2
4.	Tidak setuju	0	0
5.	Sangat tidak setuju	0	0
Total		100	100

Sumber : Data Primer diolah

Pada (Tabel 6) dapat dilihat bahwa para responden banyak yang mengatakan sistem birokrasi yang kurang berpihak pada dunia usaha. Terlihat ada 20 pengusaha (20%) yang sangat setuju dan 62 pengusaha (62%) yang setuju. Sisanya 14 pengusaha (14%) kurang setuju dan 2 pengusaha (2%) tidak setuju dan 2 pengusaha (2%) lainnya yang menyatakan sangat tidak setuju.

Pada umumnya, responden menilai sistem birokrasi di Kota Medan cukup baik. Namun akibat tindakan oknum-oknum tertentu yang menyulitkan para pengusaha, membuat para responden pesimis terhadap sistem birokrasi di Kota Medan yang kurang menguntungkan dunia usaha. Banyak responden yang mengeluhkan jika harus mengeluarkan biaya tambahan untuk setiap kali berurusan dengan birokrat tertentu. Dengan tidak adanya transparansi biaya, membuat praktik pungutan liar semakin marak. Selain itu, lamanya waktu pengurusan izin dan lain sebagainya, membuat para pengusaha harus menempuh jalur informal yang tentu saja memerlukan biaya yang tinggi agar urusannya dipercepat. Hal itu tentu merugikan pengusaha dan menghambat iklim usaha di Kota Medan.

Tabel 1.6
Persepsi Pengusaha Tentang Sistem Birokrasi di Kota Medan Kurang Menguntungkan Dunia Usaha

No.	Jawaban	Jumlah	Persen (%)
1.	Sangat setuju	20	20
2.	Setuju	62	62
3.	Kurang setuju	14	14
4.	Tidak setuju	2	2
5.	Sangat tidak setuju	2	2
Total		100	100

Sumber : Data Primer diolah

Sedangkan pada (Tabel 7) tentang persepsi pengusaha terhadap kondisi infrastruktur di Kota Medan yang memadai. Ada 51 pengusaha (51%) yang sangat setuju dan 47 pengusaha (47%) yang setuju. Sementara itu ada 1 pengusaha (1%) yang menyatakan kurang setuju karena melihat beberapa infratruktur di Kota Medan kurang memadai dan rusak. Bahkan 1 pengusaha (1%) lainnya yang menyatakan tidak setuju.

Para pengusaha mengaku ada beberapa infrastruktur yang tidak memadai di Kota Medan. Ruas jalan yang sempit dan rusak dikatakan pengusaha merupakan salah satu bentuk infrastruktur yang tidak memadai. Selain itu, krisis listrik yang terjadi di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan membuat pengusaha harus mengeluarkan biaya ekstra untuk produksi. Tak hanya itu, dengan adanya larangan menggunakan Bahan Bakar Minyak bersubsidi bagi pelaku dunia industri juga menyulitkan para pengusaha karena harus menggunakan BBM non subsidi yang harganya jauh lebih mahal. Meskipun demikian, para pengusaha tetap berkeyakinan bahwa kondisi infrastruktur di Kota Medan cukup baik dan memadai. Mereka beralasan upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah akan segera mengatasi berbagai persoalan tersebut di atas.

Tabel 1.7
Persepsi Pengusaha Terhadap Kondisi Infrastruktur di Kota Medan di Nilai Memadai

No.	Jawaban	Jumlah	Persen (%)
1.	Sangat setuju	51	51
2.	Setuju	47	47
3.	Kurang setuju	1	1
4.	Tidak setuju	1	1
5.	Sangat tidak setuju	0	0
Total		100	100

Sumber : Data Primer diolah

Faktor Penentu Iklim Usaha yang Paling Dominan di Kota Medan

Untuk mengetahui faktor yang paling dominan dalam menentukan iklim usaha di Kota Medan, ternyata didapatkan bahwa kestabilan politik dan sosial menjadi faktor paling dominan. Seperti yang tertera pada (Tabel 8) di bawah ini:

Tabel 1.8
Persentasi Faktor Paling Dominan yang Mempengaruhi
Iklm Usaha di Kota Medan

No.	Uraian Pertanyaan	Tanggapan I				Tanggapan II				
		SS	S	Faktor Penentu	Hasil (%)	KS	TS	STS	Faktor Penentu	Hasil (%)
1.	Kebijakan Pemerintah	24	51	4	18,75	21	2	2	4	6,25
2.	Kestabilan Politik dan Sosial	59	39	4	24,5	2	0	0	4	0,5
3.	Birokrasi	12	79	4	22,75	5	2	2	4	2,25
4.	Infrastruktur	12	66	4	19,5	18	2	2	4	5,5
Jumlah		85,5				14,4				
Jumlah Keseluruhan		100								

Sumber : Data Primer diolah

Dari 100 responden yang diajukan pertanyaan, maka didapatkan kestabilan politik dan sosial menjadi faktor penentu yang paling dominan dengan 24,5% dari total responden dan hanya 0,5% yang tidak sependapat dengan hal itu.

Kestabilan sosial dan politik dipilih responden sebagai faktor penentu paling dominan, karena kondisi ini sangat berpengaruh terhadap faktor-faktor lainnya. Kondisi politik membuat pengusaha bisa memprediksi iklim usaha. Dari segi politik biasanya gangguan yang paling meresahkan pengusaha yaitu tekanan dari pelaku politik atau pembuat kebijakan di tingkat legislatif. Bahkan sebagian responden beranggapan harus memanfaatkan kedekatan dengan pemimpin daerah yang berkuasa karena praktik kolusi masih dipercaya para pengusaha sebagai bagian dari mempermudah untuk menjalankan bisnis, karena masih adanya sistem jatah proyek pemerintah yang dipegang oleh oknum pimpinan tertentu.

Keberadaan kelompok pemuda yang kerap melakukan aksi premanisme dianggap merupakan bagian dari ancaman bagi pengusaha. Di samping itu, isu perburuhan, isu kenaikan upah yang berujung pada demonstrasi yang anarkis mengganggu jalannya sistem produksi. Tak hanya itu, bencana alam yang tak bisa diprediksi juga menjadikan kestabilan politik dan sosial menjadi sangat penting bagi pengusaha.

Sedangkan faktor penentu urutan ke dua adalah birokrasi dengan 22,75% dari total responden dengan 2,25% yang tidak sepakat. Para responden juga banyak yang mengeluhkan praktik sistem birokrasi yang koruptif, berbelit-belit, tidak efisien dan tidak transparan oleh oknum-oknum di dalamnya. Banyak oknum yang duduk di birokrasi memberikan biaya tambahan dari biaya resmi. Akibatnya, para pengusaha dirugikan dengan sistem seperti itu karena tak hanya memakan waktu yang panjang tetapi, pengusaha harus mengeluarkan biaya yang sangat tinggi jika urusannya dipercepat dan dipermudah. Para responden berharap adanya perubahan ke arah yang lebih baik lagi, di mana urusan pengusaha terkait dunia usaha dipermudah.

Selanjutnya, meski dinilai kurang memadai baik kualitas dan kuantitas, namun kondisi infrastruktur di Kota Medan tetap menjadi pilihan faktor penentu yang menempati urutan ketiga bagi para responden. Hal itu terlihat dari keseluruhan jawaban responden ternyata 19,5% responden memilih infrastruktur sebagai faktor penentu dengan hanya 5,5% yang tidak setuju. Para pengusaha menilai, kondisi infrastruktur di Kota Medan cukup memadai karena hampir semua yang mereka butuhkan ada.

Namun di samping itu masih adanya ditemukan ruas jalan dan jembatan yang sempit dan rusak, serta masih belum berakhirnya krisis listrik yang melanda Sumatera Utara.

Sangat dirasakan efeknya oleh pelaku dunia usaha khususnya di Kota Medan. Kondisi ini ternyata menjadi pertimbangan khusus bagi pengusaha karena mereka harus mengeluarkan uang tambahan untuk menutupi cost pasokan sumber energi lain. Tingginya biaya itu mempengaruhi iklim usaha di Kota Medan.

Kebijakan pemerintah di urutan ke empat dengan persentase 18,25% dengan persentase 6,25% yang tidak setuju. Para pengusaha yang menjadi responden dalam penelitian ini mengatakan bahwa kebijakan pemerintah kurang memberikan pengaruh terhadap iklim usaha. Karena kebijakan Pemerintahan Kota Medan dirasakan cukup baik bagi pengusaha. Salah satunya dengan kebijakan insentif dalam kawasan ekonomi terpadu dengan membuka Kawasan Industri Medan (KIM) dan Pusat Industri Kreatif (KIP) dan lain sebagainya. Selain itu, posisi pemerintah sebagai pengawas persaingan usaha juga dirasakan manfaatnya oleh para responden.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa iklim usaha di Kota Medan kondusif menurut perspektif pengusaha. Secara umum pengusaha mempunyai pengetahuan yang baik tentang iklim usaha, baik dari segi manfaat maupun kegunaannya.
2. Bahwa faktor penentu terciptanya iklim usaha yang kondusif menurut pengusaha adalah kestabilan politik dan sosial, diikuti faktor birokrasi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah.
3. Menurut pengusaha bahwa kestabilan politik dan sosial sangat dominan dalam mempengaruhi persepsi pengusaha untuk membuka usaha.
4. Menurut pengusaha bahwa sistem birokrasi di Kota Medan sudah cukup baik, walau pun masih ada ditemukan oknum yang nakal.
5. Menurut pengusaha kondisi infrastruktur di Kota Medan sudah memadai walau pun masih ada yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya.
6. Menurut pengusaha bahwa kebijakan pemerintah Kota Medan dalam mendukung dunia usaha sangat baik, misalnya kebijakan sistem perizinan satu atap (Sintap) dan adanya kawasan industri, seperti KIM dan PIK.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. 2007. *Survei Iklim Investasi Triwulan II*, <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/>
- Boediono, 2002. *Ekonomi Makro, Edisi ke empat*, BPF, Yogyakarta.
- Deliarnov, 1995. *Pengantar Ekonomi Makro*. III Press, Jakarta.
- Dwiyanto, Agus. 2002. *Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan*. Universitas Gadjah Mada, Bandung.
- Ghozali, Imam. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Grigg, Neil, dan Fontane G. Darell, 2000. *Manajemen dan Optimasi Sistem infrastruktur. "Paradigma dan Strategi Manajemen Infrastruktur"*. Fakultas Teknik Sipil Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hariyoso. 2002. *Pembaruan Birokrasi dan Kebijaksanaan Publik*. Peradaban, Jakarta.
- Hidayat, Paidi, 2012. *Analisis Daya Saing Ekonomi Kota Medan. Jurnal Keuangan dan Bisnis*, Vol 4. No. 3
- KPPOD. (2002,2003). *Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia*. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Reformasi Iklim Investasi*. Kompas: Doing Business.
- Lili Romli. (2008). *Masalah Reformasi Birokrasi. Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*. Pusat Kajian dan Penelitian Kepegawaian BKN. Vol 2. No 1
- LPEM-UI. (2001), "Construction of Regional Index of Doing Business", Laporan Akhir, Jakarta.
- Martha, Ignatia, 2010. *Upaya Peningkatan Iklim Investasi Terhadap Peluang Kerja Sama Investor Antar Daerah. Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, Vol 10. No.1
- Nazir, Moh. 2005, *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Pamungkas, Bagus Teguh. 2009. *Pengaruh Infrastruktur Ekonomi, Sosial dan Administrasi/Instansi Terhadap Pertumbuhan Propinsi-propinsi di Indonesia*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok.
- Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus, 1995. *Makro Ekonomi*, Erlangga, Jakarta.
- Simarmata, Dj. A, 1984. *Pendekatan Sistem dalam Analisa: Proyek Investasi dan Pasar Modal*, Gramedia, Jakarta.
- Singarimbun, Masri. (1995). *Metode Penelitian Survei*. LP3S, Jakarta.
- SMERU. (2002). *Otonomi Daerah dan Iklim Usaha: Kasus Tiga Kabupaten di Jawa Barat*. Jakarta: SMERU
- Soekro, Shinta RI, Anung Herlianto, M Taufik Amrozi, 2008. *Bangkitnya Perekonomian Asia Timur: Satu Dekade Setelah Krisis*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Sopandi, Andi dan Nandang Nazmulmunir. (2012). *Pengembangan Iklim Investasi Daerah. Jurnal Kybermen*. Vol 3. No. 1
- Sukesi dan Ignatia MH. (2010). *Upaya Peningkatan Iklim Investasi Terhadap Peluang Kerjasama Investor Antar Daerah. Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, Vol 10. No 1
- Sukirno, Sadono, 2004. *Makro Ekonomi Edisi II*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Tambunan, Tulus, (2006). *Iklim Investasi di Indonesia : Masalah Tantangan dan Potensi*. Jakarta : Kadin-Indonesia - Jetro.
- The World Bank, 2005, *Iklim Investasi yang Lebih Baik bagi Setiap Orang*, Laporan Pembangunan Dunia 2005, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1988. *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan, Perkembangan Teori dan Penerapan*. LP3ES, Jakarta.
- Wibowo, Singgih. dan Murdiah, Yusro Nuri Fawzya, 2000. *Petunjuk Mendirikan Usaha Kecil*, Penebar Swadaya, Jakarta.
- Wirawati, Wiwit Widya. (2013). *Penanaman Modal Asing Dalam Rangka Investasi di Indonesia*. Diakses 8 Januari 2014 dari <http://nickhanickhuna.blogspot.com/2013/05/makalah-hukum-investasi/html>.